

PENGARUH SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP
AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Submission date: 28-Aug-2019 08:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 1164221444 *by* Evy Rahmawati

File name: UNIKOM_EVY_RAHMAWATI_ARTIKEL.docx (379.71K)

Word count: 3797

Character count: 26379

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
(Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung)**

**THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM ON QUALITY OF
FINANCIAL STATEMENTS AND ITS IMPLICATIONS ON ACCOUNTABILITY OF
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
(Survey on Regional Government Organization of Bandung City)**

**Pembimbing:
Dr. Lilis Puspitawati, SE, M. Si., Ak., CA**

**Oleh:
Evy Rahmawati – 21115006**

2
**Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2019**

Email: evy.rahmawati12@gmail.com

ABSTRACT

At present regional financial management by an entity can be said to be not yet accountable. As happened in one of the institutions of the Regional Organization of the City of Bandung, which was reported by the media as not yet accountable for the management of regional finances in terms of program accountability which was not optimal. Accountability can be assessed from its financial statements. Irrelevance of the quality of financial statements, due to frequent errors in recording the regional financial accounting system.

The method used in this research is descriptive and verification methods. The Observation Unit was conducted at 27 Bandung City OPDs with the analysis unit being employees of the financial unit with a total of 54 people. The statistical test used is the calculation of Structural Equation Modeling (SEM) with a variance-based analysis of Partial Least Square (PLS) and hypothesis testing using the help of the Smart PLS 3.0 application.

The results of this study prove that the Regional Financial Accounting System significantly influences the Quality of Financial Statements. Likewise the results of the study of the Quality of Financial Statements have a significant effect on Accountability in Regional Financial Management.

Keywords: Regional Financial Accounting System, Quality of Financial Statements, Regional Financial Management Accountability.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sistem akuntansi pada sektor publik di Indonesia didorong oleh tuntutan yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* (Nuria Rahma, dkk., 2017). *Good governance* khususnya di bidang keuangan daerah merupakan kunci utama menuju *clean government*. Demi terwujudnya *good governance* dalam setiap pelaksanaan otonomi daerah diperlukan akuntabilitas dan transparansi publik. Pemerintah yang transparan dilihat dengan adanya kemudahan dan kebebasan dalam mendapatkan informasi secara akurat dan memadai terhadap pihak yang membutuhkan. Sedangkan akuntabel mengenai hubungan pertanggungjawaban pemerintah kepada *stakeholder* terhadap setiap aktivitas yang dilakukannya (Mardiasmo, 2018: 18).

Menurut Warsito Kawedar dkk. (2008: 93) pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: "Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, taat pada peraturan perundang-undangan, dan transparan, dengan memperhatikan rasa kepatuhan dan keadilan."

Selain memiliki hak dalam mengetahui pengelolaan keuangan, masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban terhadap pengaplikasian pengelolaan keuangan daerah tersebut (Abdul Halim, 2008).

Permasalahan yang terjadi dilapangan terkendala akuntabilitas program yang belum baik. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung (Ema Sumarna, 2017) mengungkapkan penerimaan pajak Kota Bandung belum memenuhi target. Tidak tercapainya target dikarenakan perencanaan yang tidak matang, tidak sesuai kondisi obyek dilapangan dan implementasi tidak optimal. Adapun piutang PBB yang terus membesar karena belum optimalnya program Sensus PBB yang sudah berlangsung sejak tahun

lalu, selain itu banyak program lainnya yang belum optimal sehingga berdampak pada serapan anggaran yang kurang optimal.

Agar dapat mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah (Sumiyati, 2015). Penyajian informasi yang lengkap dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi sehingga akan mewujudkan akuntabilitas. Berarti semakin baik laporan keuangan maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tuntutan akuntabilitas publik terhadap dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan (Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas H., 2010: 1).

Menurut Mahmudi (2016:11) laporan keuangan merupakan informasi yang disajikan untuk membantu pihak yang membutuhkan dalam membuat keputusan sehingga keputusan yang diambil dapat lebih berkualitas. Adapun menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:15) kualitas laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas apabila memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Unsur kualitatif tersebut diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipercaya.

Permasalahan di lapangan terkendala dalam laporan keuangan yang tidak relevan. Menurut Kepala BPK Perwakilan Jabar (Arman Syifa, 2018) BPK menemukan beberapa kontrak penyewaan tanah yang tidak jelas pembaharuan kontraknya, sehingga, tidak ada perhitungan akurat mengenai piutang penyewaan tanah tersebut. Temuan lainnya, aset tetap milik Pemkot Bandung berupa gedung, bangunan dan mesin tidak jelas keberadaannya. Adapun persoalan sebagian saldo jangka pendek tidak ada rinciannya. Sehingga dalam

laporan keuangannya belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan belum dapat diverifikasi keberadaannya.

Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas maka diperlukan penerapan sistem akuntansi yang baik, dapat ditunjukkan dengan minimal kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidakpatuhan terhadap hukum dan akhirnya di wujudkan dengan pemberian opini dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 102) Sistem akuntansi keuangan daerah mengatur prosedur pencatatan transaksi, pelaporan serta menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi maka akan menjamin konsistensi pada penyajian keuangan daerah yang dihasilkan.

Permasalahan di lapangan terkendala dalam sistem pencatatan BPK RI menilai belum diselesaikan Pemkot Bandung adalah terkait aset. Menurut Pjs Wali Kota Bandung (Muhamad Solihin, 2018) waktu tahun 1999 otonomi daerah itu juga ada pencatatan aset yang mungkin pada waktu itu kurang pas. Sehingga saat ini pemkot melakukan pembenahan sedikit-sedikit. Selain itu seringnya terjadi kesalahan dalam pencatatan aset tersebut. Persoalan aset memang memerlukan ketelitian dan kesabaran dalam pencatatan. Apalagi, aset Pemkot Bandung termasuk yang paling banyak untuk ukuran pemerintah kota.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Luh Kadek Sri Megawati, dkk. (2015) menghasilkan bukti empiris bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Serta penelitian Hafzan Fikrian (2017) memberikan bukti empiris bahwa Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul yaitu "**Pengaruh Sistem Akuntansi**

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung)".

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud

Solihin (2017:58) sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD.

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017: 59) adalah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan
- 2) Pengikhtisaran
- 3) Pelaporan

B. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:38) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

"Pengolahan data keuangan perusahaan diawali dari bukti-bukti transaksi berupa faktur, kuitansi, nota ,dokumen dan bukti-bukti transaksi keuangan yang lainnya dan kemudian dicatatkan dalam pembukuan perusahaan sehingga hasil akhir dari proses pencatatan dan pengidentifikasian bukti tersebut akan menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan".

Indikator kualitas laporan keuangan Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:15) adalah sebagai berikut:

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat Dibandingkan
- 4) Dapat Dipahami

C. Akuntabilitas Pengelolaan

Menurut Mardiasmo (2018: 27) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

"Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban *agent* untuk

memberikan pertanggungjawaban terhadap aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas terdiri dari dua macam diantaranya akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.”

Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2018: 28) adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
- 2) Akuntabilitas Proses
- 3) Akuntabilitas Program
- 4) Akuntabilitas Ketepatan

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2018:204) untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Telah banyak peneliti yang telah mengkaji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati dkk. (2014) dan Luh Kadek Sri Megawati dkk. (2015) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

B. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mursyidi (2013: 59) untuk mengetahui akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas atau instansi dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Untuk mencapai akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan harus berkualitas.

Beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hafzan Fikrian (2017) dan Nuria Rahma dkk. (2017) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H2: Kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif.

Menurut Sekaran & Bougie (2013: 97) metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti dapat berupa individu, peristiwa atau kondisi tertentu. Adapun menurut Umi Narimawati (2010:29) metode verifikatif merupakan suatu metode penelitian yang memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan”.

Objek penelitian menurut Sugiyono (2017:38) adalah objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

B. Sumber Data dan Teknik pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, dimana data primer dalam hasil penelitian ini adalah hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan

kuesioner. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:224) adalah "langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data."

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 27 Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian keuangan pada 27 Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung dengan jumlah responden 54 pegawai.

Ukuran sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *rule of thumb*, berdasarkan jumlah terbanyak dari indikator formatif yang terdapat dalam konstruk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah 4 dikalikan 10. Jumlah sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 54 (lebih dari 40 sampel minimal).

D. Metode Pengujian Data

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner perlu dilakukan pengujian atas kuisioner dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Menurut Hair, *et al.* (2014:121) uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen (kuesioner) yang digunakan. Nilai jawaban responden diukur menggunakan koefisien korelasi, melalui nilai korelasi setiap butir pernyataan dengan total butir pernyataan lainnya. Butir pernyataan valid jika memiliki koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,3 berdasarkan hasil pengolahan menggunakan rumus korelasi *pearson product moment* (r).

Menurut Sugiyono (2017:171) uji reliabilitas tersebut digunakan untuk mengukur berkali-kali untuk menghasilkan data yang konsisten. Selanjutnya koefisien reliabilitas yang diperoleh dibandingkan dengan 0,7, apabila nilai koefisien reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,7 maka butir pernyataan dalam kuesioner dapat diterima.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) analisis data yaitu analisis deskriptif dan analisis verifikatif.

Menurut Sugiyono (2017:199) analisis deskriptif adalah statistik deskriptif yang

digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Adapun Sugiyono (2017:91) menyatakan bahwa analisis verifikatif bertujuan untuk membuktikan pengaruh antara variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Alat analisis yang tepat untuk melakukan analisis verifikatif adalah *Structural Equation Modeling-partial Least Square* (SEM-PLS) Menurut Hair, *et al.* (2014:4), penggunaan *Structural Equation Modeling* (SEM) memungkinkan peneliti untuk menyatukan beberapa variabel yang tidak teramati yang diukur secara tidak langsung oleh indikatornya serta dapat digunakan untuk menghitung kesalahan pengukuran pada variabel yang teramati.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Deskriptif

1. Hasil Analisis Deskriptif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berikut disajikan presentase mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung.

Tabel 4.10
Persentase Skor Jawaban Responden
Mengenai Variabel Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1.	Pencatatan	183	270	67,8%	Cukup Baik
2.	Pengikhtisaran	250	270	92,6%	Sangat Baik
3.	Pelaporan	248	270	91,9%	Sangat Baik
	Total	681	810	84,1%	Sangat Baik

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 681 (84,1%) berada di antara interval 84% - 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berada dalam kategori sangat baik, namun masih terdapat gap sebesar 15,9% yang menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah khususnya pada indikator pencatatan.

2. Hasil Analisis Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan

Berikut disajikan presentase mengenai Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung.

Tabel 4.15
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1.	Relevan	182	270	67,4%	Cukup Baik
2.	Andal	240	270	88,9%	Sangat Baik
3.	Dapat Dibandingkan	233	270	86,3%	Sangat Baik
4.	Dapat Dipahami	232	270	85,9%	Sangat Baik
Total		887	1.080	82,1%	Baik

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar 887 (82,1%) berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan berada dalam kategori sangat baik, namun masih terdapat gap sebesar 17,9% yang menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam Kualitas Laporan Keuangan khususnya pada indikator Relevan.

3. Hasil Analisis Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut disajikan presentase mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung.

Tabel 4.18
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1.	Akuntabilitas Kejelasan dan Akuntabilitas Hukum	247	270	91,5%	Sangat Baik
2.	Akuntabilitas Proses	235	270	87%	Sangat Baik
3.	Akuntabilitas Program	183	270	67,8%	Cukup Baik
4.	Akuntabilitas Kebijakan	258	270	95,6%	Sangat Baik
Total		923	1.080	85,5%	Sangat Baik

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 923 (85,5%)

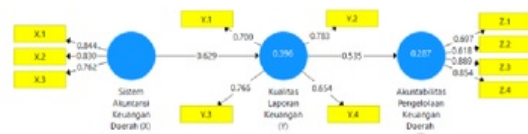
berada di antara interval 84% - 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berada dalam kategori sangat baik, namun masih terdapat gap sebesar 14,5%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya indikator akuntabilitas program.

B. Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dan pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Pada penelitian ini, terdapat 11 variabel manifes dan 3 variabel laten yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) yang dikur dengan 3 variabel manifes, Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan 4 variabel manifes dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z) dengan 4 variabel manifes. Berikut akan disajikan model yang akan diujikan dalam penelitian ini.

Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 3.0* adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2
Diagram Jalur Model Lengkap/Nilai Path Coefficient

Adapun hasil persamaan model structural pada penelitian ini dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = 0,629 X + \zeta$$

$$Z = 0,538 Y + \zeta$$

Untuk melihat persentase pengaruh dari setiap variabel laten eksogen terhadap variabel endogen, berikut disajikan koefisien determinasi parsial dan simultan (R^2) yang merupakan hasil kali dari koefisien jalur struktural dengan korelasi dengan variabel laten endogen.

- a. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 39,6% terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan sebanyak ($1-R^2$) 60,4% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ) dalam penelitian ini.
- b. Kualitas Laporan Keuangan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 28,7% terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan sebanyak ($1-R^2$) 71,3% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ) dalam penelitian ini.

1. Analisis Koefisien Korelasi

Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai korelasi sebesar 0,629 yang berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh yang kuat arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung. Arah hubungan positif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

Selanjutnya pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa nilai korelasi sebesar 0,535 yang berarti Kualitas Laporan Keuangan memberikan pengaruh yang sedang arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kota

Bandung. Arah hubungan positif Kualitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan yang semakin baik akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Analisis Koefisien Determinasi

Hasil dari koefisien determinasi penelitian ini diketahui bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh sebesar 39,6% terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan sisanya 60,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Sedangkan hasil penelitian Kualitas Laporan Keuangan memberikan pengaruh sebesar 28,7% terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan sisanya 71,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3. Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian, nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X diperoleh sebesar 2,929. Nilai tersebut lebih besar dari 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung dengan kontribusi pengaruh sebesar 39,6%.

b. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan (Y) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z)

Berdasarkan hasil penelitian, nilai $t_{statistik}$ untuk variabel Y diperoleh sebesar 2,147. Nilai tersebut lebih besar dari 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya bahwa Kualitas Laporan Keuangan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung dengan kontribusi pengaruh sebesar 28,7%.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 5,929 lebih besar dari t_{kritis} (2,008) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai korelasi sebesar 0,629 yang berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh yang kuat arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung. Arah hubungan positif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil dari koefisien determinasi penelitian ini diketahui bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh sebesar 39,6% terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan sisanya 60,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

2. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 5,147 lebih besar dari t_{kritis} (2,008) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung.

Sementara pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa nilai korelasi sebesar 0,535 yang berarti Kualitas Laporan Keuangan memberikan pengaruh yang sedang arah positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung. Arah hubungan positif Kualitas

Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan yang semakin baik akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan hasil penelitian Kualitas Laporan Keuangan memberikan pengaruh sebesar 28,7% terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan sisanya 71,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dimana semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka Kualitas Laporan Keuangan akan meningkat dan begitupun sebaliknya.
- 2) Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana semakin baik Kualitas Laporan Keuangan maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah akan ikut meningkat.

B. Saran

Peneliti telah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta implikasinya terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Praktis

- a. Pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka yang harus diberikan fokus perhatian adalah pada indikator Pencatatan, dimana OPD Kota Bandung perlu meningkatkan kualitas tenaga ahli akuntannya untuk menyelesaikan permasalahan terkait kesalahan pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah dan juga melakukan pencatatan secara kronologis. Perbaikan masalah

pencatatan di laporan keuangan perlu dilakukan supaya semua informasi yang ada di laporan keuangan pemkot Bandung bisa disajikan secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta di lapangan.

- b. Pada Kualitas Laporan Keuangan maka yang harus diberikan fokus perhatian adalah pada indikator Relevan, dimana OPD Kota Bandung harus bisa memastikan Laporan Keuangan yang dibuat oleh tenaga akuntannya harus jelas dan relevan sesuai dengan kondisi yang ada di Pemkot Bandung. Laporan Keuangan yang dibuat harus bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas.

2. Saran Akademis

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat

Arman Syifa. 31 Mei 2018. *Ada Sejumlah Masalah, Kota Bandung Gagal Lagi Raih WTP dari BPK*. Melalui <https://regional.kompas.com/read/2018/05/31/10323921/adasejumlah-masalah-kota-bandung-gagal-lagi-raih-wtp-dari-bpk>

Bougie, & Sekaran. 2013. *Research Methods for Business: A skill Building Approach*. New York.

Deddi Nordiawan dan Ayunigtyas Hertanti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah, Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ema Sumarna. 2017. *Pajak 2017 Tak Penuhi Target, Begini Upaya Pemkot Bandung*. Melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3976166/pajak-2017-tak-penuhi-target-begini-upaya-pemkot-bandung>

Grahita Chandrarin. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Hafzan Fikrian. 2017. *Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*. JOM Fekon Vol. 4 No. 2.

Joseph F. Hair et.al. 2014. *A Primer on parsial least squares structural equation modelling (PLS-SEM)*. SAGE Publication : London.

Kadek Desiana Wati dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 No: 1 tahun 2014.

- Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Luh Kadek Sri Megawati dkk. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng*. E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3 No: 1 tahun 2015.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nuria Rahma, Restu A., dan Meilda W. 2017. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu)*. JOM Fekon Vol. 4 No. 2.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- 4
Sumiyati. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir)*. JOM Fekon Vol. 2 No. 2.
- Umi Narimawati, Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Jakarta: Genesis.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Warsito Kawendar, Abdul Rohman dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Widya Karya Semarang.

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	9%
2	elib.unikom.ac.id Internet Source	3%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On